

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI BALI PERIODE 2019-2021**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**IDA BAGUS PUTU DIKA NANDIKA**

**1915613158**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2022**

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI BALI PERIODE 2019-2021**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**IDA BAGUS PUTU DIKA NANDIKA**

**1915613158**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Bagus Putu Dika Nandika

NIM : 1915613158

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2019-2021

Pembimbing 1 : I Made Made Marsa Arsana, SE.,M.M.A

Pembimbing 2 : I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T

Tanggal Uji : 8 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jimbaran 20 Juli 2022



Ida Bagus Putu Dika Nandika

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI BALI PERIODE 2019-2021**

**Ida Bagus Putu Dika Nandika**

**1915613158**

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III

Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali


Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

**Pembimbing I**



I Made Marsa Arsana, SE., M.M.A  
NIP. 196210181990031003

**Pembimbing II**



I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T  
NIP. 197801192002121001

**Disahkan oleh :  
Jurusan Akuntansi  
Ketua**



I Made Sudana, S.E., M., Si.  
NIP. 196112281990031001

## TUGAS AKHIR

### ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 8 Agustus 2022

#### PANITIA PENGUJI

KETUA :




I MADE MARSA ARSANA, SE.,M.M.A  
NIP. 196210181990031003

ANGGOTA :



1. WAYAN HESADIJAYA UTTHAVI, S.E.,M.SI.  
NIP. 198511052014041001



2. I MADE SURA AMBARA JAYA, SE, M.M.A  
NIP. 196705111993031003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya tugas akhir yang berjudul “ Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2019-2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, saran, sumbangan pendapat, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nyoman Abdi, S.E., M.Si., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dalam mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., AK, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan semangat dan pengarahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak I Made Marsa Arsana, SE., M.M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan samngat, bimbingan, dan nasehat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak I Made Santha, S.E., M.Si, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Keluarga, teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan selama melaksanakan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, Pebruari 2022

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Ida Bagus Putu Dika Nandika

# **ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI PERIODE 2019-2021**

## **ABSTRAK**

**Ida Bagus Putu Dika Nandika**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali telah diberi pertanggung jawaban mengelola dan mengalokasikan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai salah satu unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Jumlah pengalokasian APBD dapat memberikan gambaran ukuran kinerja instansi sebagai pengelola dana APBD. Sesuai dengan laporan realisasi anggaran 2019-2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali persentasenya mengalami penurunan pada periodenya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pengalokasian anggaran yang belum mandiri, efektif, serta efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola tersendiri secara mandiri, efektif, dan efisien. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Cok Agung Tresna No. 14 Panjer, Kota Denpasar. Objek pada penelitian yang dilakukan berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2021. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran tahun 2019-2021 dan rencana kerja anggaran tahun 2019-2021 serta data kualitatif berupa wawancara tentang penyebab penurunan persentase realisasi APBD tahun 2019-2021. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sudah mencapai target 100% pada rasio kemandirian dengan pendukungnya seluruh kinerja dilakukan tanpa bantuan Pemerintah Pusat dan pendapatan tersendiri dari penerimaan pajak daerah serta hasil retribusi daerah. Tingkat efektivitas PAD berada pada tingkat efektif yaitu 108,31%, 87,44%, dan 90,06%. Efisiensi belanja tahun 2019-2021 berada pada tingkat efisien dengan persentase 92,58%, 94,53%, dan 74,64%.

**Kata Kunci : Analisis Kinerja APBD, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi**



**ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE REGIONAL REVENUE  
AND EXPENDITURE BUDGET AT THE REGIONAL REVENUE  
AGENCY OF BALI PROVINCE FOR THE 2019-2021 PERIOD**

**ABSTRACT**

**Ida Bagus Putu Dika Nandika**

The Regional Revenue Agency of Bali Province has been given the responsibility of managing and allocating regional revenue and expenditure budget funds (APBD) as one of the units of the Regional Government Work Unit (SKPD). The amount of APBD allocation can provide an overview of the agency's performance as a APBD fund manager. In accordance with the 2019-2021 budget realization report of the Bali Provincial Revenue Agency, the percentage has decreased in its period referring to Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management and budget allocation that has not been independent, effective, and efficient. The purpose of this study is to determine the performance of regional revenue and expenditure budgets that are managed independently, effectively, and efficiently. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Bali Province which was located on Jl. Cok Agung Tresna No. 14 Panjer, Denpasar City. The object of the research conducted was a report on the realization of the regional revenue and expenditure budget for 2019-2021. The type of data used is quantitative data in the form of a budget realization report for 2019-2021 and a budget work plan for 2019-2021 as well as qualitative data in the form of interviews about the causes of the decrease in the percentage of APBD realization in 2019-2021. Data are obtained through interviews and documentation. It can be concluded that the independence of the Regional Revenue Agency of Bali Province has reached the target of 100% on the ratio of independence with its supporters all performance is carried out without the help of the Central Government and separate income from regional tax revenues and regional levy results. The effectiveness level of PAD is at the effective level of 108.31%, 87.44%, and 90.06%. Spending efficiency in 2019-2021 is at an efficient level with percentages of 92.58%, 94.53%, and 74.64%.

**Keywords : APBD Performance Analysis, Independence, Effectiveness,**

**Efficiency**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional mengisyaratkan kepada seluruh elemen masyarakat akan pentingnya meningkatkan produktivitas di segala bidang agar tercapainya pemerataan pembangunan. Pembangunan merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat dan kegiatan ekonomi). Pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 berdasar pada Undang-undang (UU) No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 32/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah kemudian menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait dengan pemberian kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengelola sendiri keuangannya, di antaranya PP No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang terdesentralisasi ternyata

memiliki banyak persoalan. Pemerintah daerah (Pemda) belum sepenuhnya siap atau serius melaksanakan peraturan perundangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah. Beberapa kasus korupsi dan penyimpangan pengelolaan keuangan di Pemda yang kemudian terjadi, baik di pihak pemerintah daerah (eksekutif) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD (legislatif), dipandang sebagai akibat dari ketidaksiapan Pemda tersebut. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat sekarang masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan dari adanya kesenjangan ekonomi spasial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antar daerah. Di sisi lain, masih terdapat pula ketimpangan sosial ekonomi akibat dari terbatasnya akses kelompok masyarakat terhadap faktor produksi yang menyebabkan produktivitas rendah dan selanjutnya berdampak pada tingkat kesejahteraan yang rendah (miskin). Seiring perkembangan waktu, potensi meningkatnya kesenjangan hingga saat ini pun masih relatif cukup besar, dan memunculkan dikotomi antar pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta antara daerah maju dan daerah terbelakang. Dalam konteks ini pembangunan daerah akan dituntut untuk lebih memiliki sifat – sifat yang peka dalam dimensi profesionalisme, efisiensi dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu diperlukan analisis ekonomi wilayah dalam perencanaan pembangunan kedepan juga menyangkut berbagai dimensi pengukuran yang berguna untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat kabupaten / kota, maupun di tingkat komunitas. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk pelaksanaan pembangunan. Indikator-indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena daerah dan dinamika daerah. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali sebagai salah satu SKPD diberi pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dana yang dialokasikan dalam APBD dapat memberikan gambaran ukuran kinerja dalam pengelolaan. Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk melaksanakan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah juga cenderung melemah, yang berakibat kepada wujud daerah dan pemerintah daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai.

Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali masalah yang timbul adalah jumlah persentase realisasi tidak tercapai 100% dari target anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya jumlah realisasi APBD setiap tahunnya mengalami penurunan. Dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Realisasi APBD BAPENDA Provinsi Bali 2019-2021

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	3.106.032.774.103,55	3.345.107.184.032,74	107,70
2020	2.860.569.117.995,48	2.490.709.693.000,47	87,07
2021	2.614.147.611.765,00	2.378.397.048.077,00	90,98

Sumber : Data sekunder diolah (LRA APBD BAPENDA Provinsi Bali 2019-2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 persentase dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali dalam kurun waktu tiga tahun mengalami penurunan yaitu dari tahun 2019 dengan jumlah persentase sebesar 107,70%, tahun 2020 dengan jumlah persentase 87,07%, dan tahun 2021 dengan jumlah persentase 90,98%.

Tahun 2019 mengalami surplus pada pendapatan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mampu tercapai lebih dari 100% dimana pendapatan ini bersumber dari pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Hasil Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan realisasi rata-rata sebesar 106,83%.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327, Tahun 1996.

Kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja dapat dikategorikan berikut ini.

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Untuk itu tahun 2019 kriteria efektivitas PAD terkategori pada tingkat sangat efektif yang mampu mengejar target lebih dari 100%.

Tahun 2020 pendapatan mengalami penurunan dengan jumlah persentase realisasi APBD sebesar 87,07%. Kondisi ini disebabkan oleh adanya isu ekonomi global Covid-19 dengan masyarakat dimana pendapatan dari pajak daerah mengalami penurunan yaitu BBNKB tahun ini hanya terealisasi sebesar 52,95%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 75,53%, dan Pajak Air Permukaan hanya mencapai 95,88%. Tahun sebelumnya tiga sumber pajak daerah ini sudah terealisasi melewati 100%. Tahun ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil maka realiasi PAD hanya

tercapai 87,44%. Tahun ini dikategorikan cukup efektif sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.

Tahun 2021 persentase realiasi APBD mengalami peningkatan dengan jumlah 90,98%. Tahun ini sudah mengalami peningkatan pendapatan dimulai dari pajak daerah dengan persentase PKB sebesar 122,89%, BBNKB sebesar 48,26%, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 78,37%. Tahun ini pemerintah daerah meningkat PAD melalui PKB dan BBNKB yang dalam kurun waktu satu tahun mengejar target penerimaannya. Sesuai hasil wawancara tidak terstruktur program pemerintah dalam melaksanakan BBNKB dan PKB terkait penerimaan pendapatan. Masyarakat juga dipermudah dengan fasilitas dan program baru untuk memenuhi pendapatan PEMDA terkait dengan PAD, namun masih mendapatkan hasil yang belum mencapai target realisasi PAD dengan jumlah persentasenya sebesar 90,06%. Kategori untuk persentase ini adalah efektif sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.

Penelitian ini dilakukan pada BAPENDA Provinsi Bali karena PEMDA ini merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangannya sendiri dan untuk mengetahui apakah BAPENDA Provinsi Bali telah merealisasikan APBD secara mandiri, efektif dan efisien. Disamping itu penelitian tentang APBD pada BAPENDA Provinsi Bali dilakukan untuk meningkatkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan pada BAPENDA Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI PERIODE 2019-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah tersebut adalah apakah kinerja APBD pada BAPENDA Provinsi Bali Periode 2019-2021 sudah terealisasi secara mandiri, efektif, dan efisien?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja BAPENDA Provinsi Bali dalam merealisasikan APBD secara mandiri, efektif dan efisien tahun 2019-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi mahasiswa**

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori – teori yang telah diperoleh dengan membandingkan dan mengaplikasikan teori – teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di perusahaan.

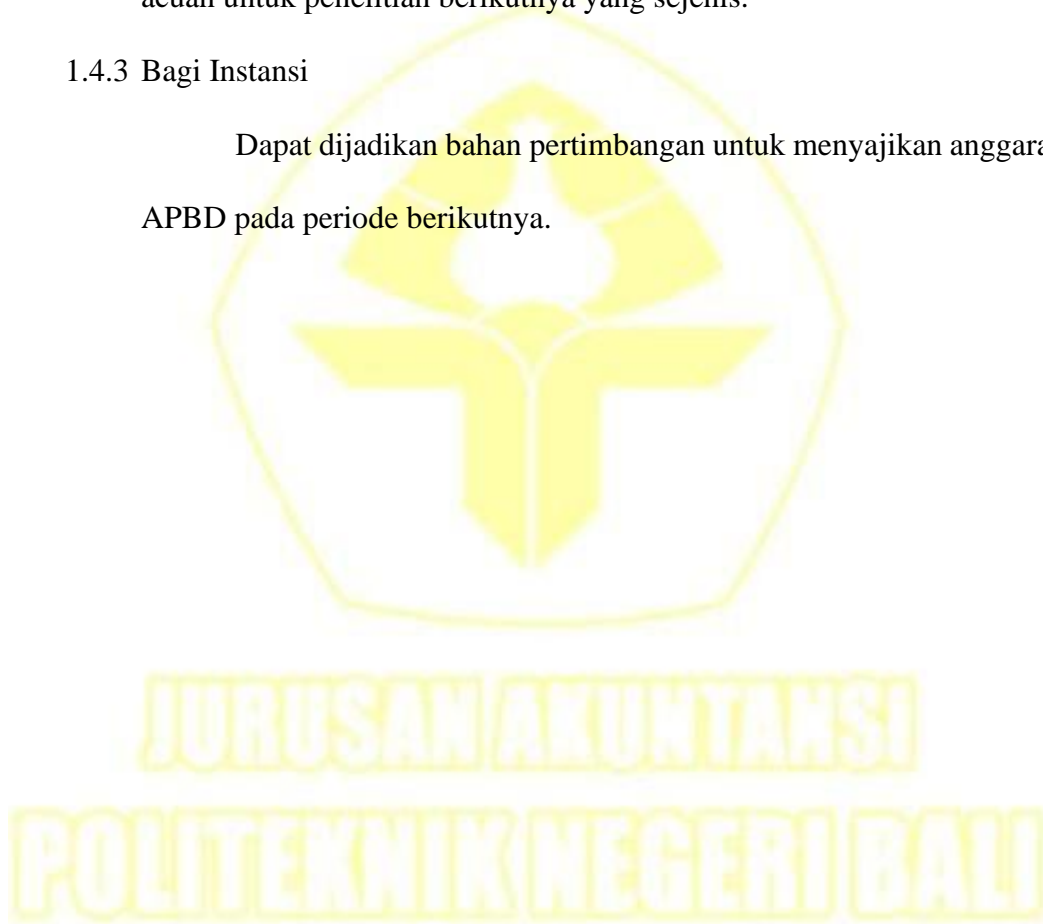


#### 1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Dapat digunakan sebagai perbandingan antara kurikulum yang diberikan di kampus dengan praktik yang ada di perusahaan, menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan memperbanyak bacaan di perpustakaan Politeknik Negeri Bali serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

#### 1.4.3 Bagi Instansi

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyajikan anggaran APBD pada periode berikutnya.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil dari analisis kinerja anggaran pendapatan daerah dengan realisasinya pada BAPENDA Provinsi Bali tahun anggaran 2019-2021 dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendapatan pada instansi tersebut Mandiri. Hal ini dapat terlihat pada perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, maka BAPENDA telah mandiri dalam mengelola keuangan. Hal ini diperoleh dari besarnya PAD yang bersumber dari pajak daerah yaitu PKB, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Dapat dilihat pada tiga periode BAPENDA sama sekali tidak menerima pinjaman maupun bantuan dari Pemerintah Pusat. Dengan tingginya rasio kemandirian keuangan daerah maka BAPENDA telah mampu mengelola sendiri keuangan daerah yang dilakukan dengan persentase 100%.

Efektivitas PAD berada pada tingkat sangat efektif di tahun 2019 yaitu 108,31%, cukup efektif pada tahun 2020 yaitu 87,44%, dan efektif pada tahun 2021 yaitu 90,06%. Pada tingkat sangat efektif 108,31% diperoleh dari PKB sebesar 109,93%, BBNKB 108,29%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 99,46%, Pajak Air Permukaan sebesar 101,92%, Pajak Rokok sebesar 97,49%, dan Hasil Retribusi Daerah sebesar 141,11%, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 93,67%. Tahun 2019 BAPENDA sudah melaksanakan peningkatan PAD yang dengan optimal dan memperoleh kategori sangat efektif. Tahun 2019 BAPENDA mengalami penurunan

efektivitas realisasi anggaran terkait pendapatan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih dan berpengaruh pada PAD dimana sumber yang diperoleh berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga PAD menurun. Komponen dari PAD tersebut adalah PKB mengalami peningkatan dengan persentasenya 118,24%, BBNKB mengalami penurunan dengan persentase 52,20%, Pajak Bahan Bakar Bermotor mengalami penurunan dengan persentase 75,53%, dan Pajak Air Permukaan menurun sebesar 95,88%. Tahun 2021 sudah berangsur-angsur membaik dimana efektivitasnya dinilai efektif dengan persentase 90,06% dengan sumber PAD yang meningkat juga.

Efisiensi belanja pada BAPENDA Provinsi Bali untuk tahun 2019 berada pada tingkatan kurang efisien yaitu 92,58%, dan tahun 2020 berada pada tingkatan yang sama yaitu 94,53%. Pada tahun 2021 tingkatan efisiensi belanja BAPENDA Provinsi Bali berada pada posisi efisien dengan persentase sebesar 74,64%. Perhitungan penilaian kinerja pemerintah masih berada pada basis penyerapan anggaran, dimana anggaran harus terserap sebanyak-banyaknya. Jika serapan anggaran tinggi diasumsikan bahwa hal itu mengindikasikan kinerja yang pula padahal belum tentu seperti itu. Dapat diketahui dari hasil perhitungan tersebut bahwa dua tahun pada 2019-2020 dinilai kurang efisien dan tahun 2021 dinilai efisien karena basis kinerja anggarannya ditentukan oleh tingginya serapan bukan kualitas output dan keluarannya. Nilai efisiensi tahun 2019-2020 sebesar 92,58% dan 95,53%, kondisi ini dinilai kurang efisien yang artinya penyerapan anggaran banyak mengalami kebocoran, belum menyentuh

target yang direncanakan secara maksimal sehingga keluar hasil yang dirasakan masyarakat belum maksimal, hanya jumlah nominal anggarannya yang habis., sementara outputnya kurang maksimal. Tahun 2021 sudah menunjukkan bahwa BAPENDA dalam melaksanakan penghematan sumber daya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90.900-327 Tahun 1996 dimana kefisiensian belanja daerah mampu mengimbangi pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

## **5.2 Saran**

Setelah mengetahui kesimpulan dari hasil terhadap kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019-2021 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali, dapat disampaikan beberapa saran berikut ini.

1. Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah sebaiknya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali lebih meningkatkan pendapatannya agar pada tahun selanjutnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali dapat meningkatkan keefektifan pengelolaan pendapatan.
2. Dalam pengelolaan belanja sebaiknya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali lebih melakukan penghematan agar tingkat efisiensi belanja lebih rendah dan tidak terjadi serta melakukan pemborosan.
3. Untuk meningkatkan PAD yang merupakan sumber penerimaan terbesar Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali dapat melakukan

beberapa cara seperti intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Dalam lima tahun mendatang, kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia akan ditingkatkan dengan mengandalkan pada kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah, namun seluruhnya merupakan hasil dari manajemen pengelolaan kinerja instansi tersebut demi tercapainya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyana Lailatus Sholikhah, N. P. (2022). *Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara*. 14(1), 1–12. [Http://Journal.Maranatha.Edu](http://Journal.Maranatha.Edu)
- Djuanda, D. M. 2010. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Fitri Irka Wahyu Niansyah, A. T. B. (2018). *Indonesian Treasury Review*. 3.
- Harry Al Makka, David P.E. Saerang, I. E. (2015). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu*. 15(1).
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- LABI, A. (2019). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 - 2015 Alfred*. 5.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Menteri, D. D. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia.
- Ni Wayan Ratna Sari, Ketut Sariana, Kadek Mega Utami, I. A. R. D. (2017). *Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali*. 7(1), 80–92.
- Sinambela, E. (2016). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. 16.
- Veronika Nini , Robin Jonathan, I. R. (2018). *Analisis Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Panglima Sebaya Kabupaten Paser Veronika*. 1, 1–8.